

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arie S. Hutagalung, 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Penerbit Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2013, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Hadjon M. Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hajar. M, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Pekanbaru.
- H.M. Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Irwan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya Arkota, Surabaya
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Umar Ma'ruf, 2014, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah & Asas-Asas Hukum Pertanahan*, Unissula Press, Semarang.
- Muchtar Wahid, 2008, *Memaknai kepastian hukum Hak Milik Atas Tanah*. Republika, Jakarta.
- Musfiqon, 2012, *Panduan lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Nazir, Moh, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Rony Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, CV, Ramadja Karya, Bandung.

B. JURNAL

- Anjar Alatas Sasmita, Ma'ruf Hafidz & Hasbuddin Khalid, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Sebagai Upaya Mencegah Terbitnya Setipikat Ganda*, Lex Generalis, Vol 3, 2022.
- Ardiles Eric Panget, *Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Memiliki Sertifikat Hak Milik Ganda*, Lex Administratum Vol.I (No. 3) 2013.
- Betty Rubiatia, *Kepastian Hukum Pemilikan Rumah Susun Oleh Orang Asing Di Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Nasionalitas*, Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Vol 1, 2021, hlm 76.
- Christiana Sri Murni, Sumirahayu Sulaiman, *Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 (No. 2) 2022.
- Darwis Anatami. Tanggung jawab siapa, bila terjadi sertifikat ganda atas sebidang tanah. Jurnal Hukum Vol 12, 2017
- Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, Irawati, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin*, Notarius, Vol.13 (No. 2), 2020.
- Mudakir Iskandar Syah, *Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan*, Vol 4, No. 2, 2014.
- Nur Triaji Antasena, *Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Pengganti Yang Hilang Oleh Badan Pertanahan Nasional*, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Vol 3, 2019.
- Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, Sauda Julia Merliyana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*, Jurnal Edumaspul, Vol. 6, (No. 1), 2022.
- Sitti Maryam Patajai, *Nilai Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah*, Vol 21, 2019.

- Sapardiyono, Sukmo Pinuji, *Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan Dan Hak Atas Tanah Melalui Sertipikat Tanah Elektronik*, Jurnal Widya Bhumi, Vol 2, 2022.
- Yuniva Kurnia¹, Fifiana Wisnaeni, *Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam Mencegah Sertifikat Ganda pada Program PTSL*, Notarius, Vol 18, 2025.
- Yudha Chandra Arwana, Ridwan Arifin, *Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, Vol 1, 2019.
- Zainal Abidin, Zulkifli Makkawaru, Andi Tira, *Analisis Yuridis Keabsahan Sertipikat Hak Atas Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Bone*, Journal of Legality of Law, 2024.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

D. INTERNET

Anugrah Dwi, 2023, *Cara Menyusun Kerangka Teori Dalam Karya Ilmiah*, <https://fkip.umsu.ac.id/>, diakses tanggal 1 November 2024 pukul 18.42 WIB.

Ragam info, 2024, *Materi Dasar Pertanahan: Dasar-dasar Hukumnya*, <https://kumparan.com>, diakses pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 23.03 WIB.

Ririn Wahyuni, 2025, *Apa saja Jenis Sertipikat Tanah?*, <https://sumbar.atrbpn.go.id/>, diakses pada tanggal 21 Mei 2025, pukul 20.15 WIB

Syafnidawaty, 2020, *Metodologi Penelitian*, <https://raharja.ac.id>, diakses pada tanggal 1 November 2024, pukul 19:35 WIB.

Shanti Rachmadsyah, 2010, *Bagan/Proses/Prosedur Pembuatan Sertipikat Tanah*, <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 23.03 WIB.

Tim Penulis Hukumku, 2025, *Prosedur Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah dan Langkah Pencegahannya*, <https://www.hukumku.id/>, diakses tanggal 22 Mei 2025, pukul 15.51 WIB.